

PANDUAN

Menuju Pesantren Hijau



DARI PESANTREN
MERAHAT BUMI



LEMBAGA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PERUBAHAN IKLIM KHILAFATUL ULAHA



Menuju Pesantren Hijau

Copyright @ LPBI

Jalan Kramat Raya No. 164, RT. 7 / RW. 2, Kenari, Kec. Senen,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penanggung Jawab

Muhammad Ali Yusuf

Ketua Lembaga Penanggulangan Penanggulangan Bencana
dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU)

Tim Penyusun

Imam Malik

M. Zidni Nafi'

Tata Letak

PT. Yellow Printing

Sampul

Imambang Ali



DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA UMUM PBNU	v
SAMBUTAN KETUA LPBI NU	viii
MANIFESTO PESANTREN HIJAU	1
Latar belakang	1
DASAR PEMIKIRAN PESANTREN HIJAU	3
Manusia sebagai Khalifah	3
Gerakan Internasional Menuju Pembangunan Berkelanjutan.....	6
Amanah NU untuk Kelestarian Alam	7
INISIATIF PESANTREN HIJAU	15
Ta’rif Pesantren Hijau	15
Siapa dan Bagaimana Pesantren Hijau	15
Kemana Pesantren Hijau Berlabuh?	16
Aktivitas kunci Program Pesantren Hijau:.....	16
LPBI, BSN dan Komitmen Pesantren.....	23
TIGA KOMPONEN PEANTREN HIJAU	23
Tata Kelola Sampah.....	23
1.2 Infrastruktur	26
1.3 Sumber Daya Manusia.....	27
1.4 Kebijakan Pesantren	28
1.5 Prosedur	29
Tata Kelola Air.....	30



2.1	Infrastruktur	31
2.2	Sumber Daya Manusia.....	32
2.3	Kebijakan Pesantren	32
2.4	Prosedur	33
	Energi Baru Terbarukan (EBT).....	34
3.1	Infrastruktur	35
3.2	Sumber Daya Manusia.....	36
3.2	Kebijakan Pesantren	37
3.3	Prosedur	37
	Ruang Terbuka Hijau (Taman Pesantren).....	38
4.1	Infrastruktur	39
4.2	Sumber Daya Manusia.....	40
4.3	Kebijakan Pesantren	40
4.4	Prosedur	41
	PRAKTIK TERBAIK PESANTREN HIJAU	42
	Pesantren Ihya' Ulumaddin Cilacap	42
	Pesantren Annuqayyah Sumenep.....	44
	Instalasi Biogas Komunal di Pesantren Al-Yasini Pasuruan.....	47



Pengantar Ketua Umum PBNU

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Langkah dan gerak nyata yang dilakukan oleh LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama) harus terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan perubahan zaman. Bumi sudah semakin menua, kerusakan di laut dan di daratan nampak sudah nyata—begitu Alquran sudah memperingatkan kepada umat manusia.

Dalam hal ini NU sangat perihatin dengan status Indonesia sebagai negara terbesar kedua di dunia penghasil limbah plastik setelah China. Setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 130.000 ton sampah plastik. Tidak sedikit pula sumber-sumber air bersih yang tercemar oleh limbah beracun pabrik-pabrik.

NU mendorong semua pihak melakukan upaya yang lebih keras untuk menekan dan mengendalikan laju pencemaran dan kerusakan alam di Indonesia. Salah satu cara strategis adalah meningkatkan kapasitas berupa pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi isu-isu lingkungan berbasis kearifan lokal terutama melalui pesantren dan madrasah.

Penulisan buku saku “Menuju Pesantren Hijau” ini sangat tepat untuk dihadirkan di pondok pesantren. Hal ini



berdasarkan asal usulnya bahwa pesantren lahir dan berkembang di dekat kawasan sumber daya alam (SDA); pesisir pantai, persawahan, dan pegunungan. Artinya, isu-isu lingkungan bukanlah baru untuk kaum santri. Sehingga, pada dasarnya hubungan antara pesantren dengan alam dan lingkungan itu dekat serta tidak bisa dipisahkan (*hablu min al-'alam*).

Pada masa lalu pesantren menempatkan tradisi sebagai proyeksi besarnya, maka pada masa kini tradisi pesantren harus melihat realitas bahwa kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah berubah. Itu juga salah satu landasan mengapa Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama II yang diselenggarakan pada Februari 2019 di Pesantren Citangkolo, Banjar, Jawa Barat mengangkat tema “*Memperkuat Khidmah Wathoniyah untuk Kedaulatan Rakyat*”.

Kedaulatan rakyat dalam pemahaman orang pesantren dapat dipahami pada dua sisi; *pertama*, kedaulatan yang dimulai dari diri sendiri (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول). Larangan dan himbauan tentang perusakan bumi dan anjuran menjaganya harus digalakkan kembali. Hampir semua pesantren punya potensi dan modal. Sehingga misalnya bisa memulai untuk mengelola air bersih, penghijauan, mendaurulang sampah, dan lain sebagainya. *Kedua*, kedaulatan dengan tidak mudah diiming-imingi oleh pihak-pihak yang orientasinya untuk memperkaya diri melalui aktivitas yang berdampak *mafsadah* bagi kehidupan orang banyak.

Terakhir, saya sangat mendukung langkah LPBNU untuk mendorong pondok pesantren melakukan ‘jihad hijau’,



karena gerakan “Pesantren Hijau”—yang juga sebagai warna dominan dalam logo NU—adalah langkah nyata kaum santri membuat perubahan untuk kelestarian lingkungan.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Oktober 2019

Prof. KH. Said Aqil Siradj, MA

Ketua Umum PBNU



Sambutan Ketua LPBI NU

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah *Sustainable Development Goals* (SDGs) diadopsi oleh seluruh negara anggota PBB sejak 2015, maka semua pihak harus memberikan sumbangsih yang nyata terhadap kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan/berkesinambungan. Lebih dari itu, menjaga kelestarian alam bukan semata-mata karena bagian dari tujuan global, tetapi ia adalah amanah manusia sebagai *khalifah* di dunia.

Masa depan selalu milik generasi yang akan datang. Prinsip ini kiranya menjadi pegangan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) untuk terus berupaya menginisiasi, mendukung dan mengembangkan setiap upaya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup agar masa depan bumi ini tetap terjaga untuk kehidupan generasi masa depan.

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, saya ingin mengajak semuanya untuk menyambut hadirnya buku panduan Pesantren Hijau ini. Buku panduan yang ada ditangan anda ini hakekatnya adalah untuk memberikan panduan agar perilaku tidak ramah lingkungan dapat terus dihindari dan diminimalisir. Selain itu, buku ini juga berusaha memberikan sedikit inspirasi bagi komunitas



pesantren yang saat ini tengah memulai dan mengembangkan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan lebih terstruktur.

Buku ini didesain dengan logika, bahasa, dan alur berpikir menggunakan pendekatan yang telah berkembang di pesantren. Peran LPBI NU tidak lain hanyalah mencatat sebagian proses pelestarian lingkungan yang telah berkembang di sebagian pesantren di Indonesia untuk kemudian mendesain dan menyajikannya agar menjadi inspirasi bagi pesantren yang lain.

Buku panduan yang berada di tangan anda ini adalah sintesis dari kisah sukses berbagai pesantren dalam upaya menginisiasi dan mengembangkan program pelestarian lingkungan hidup. Pesantren-pesantren itulah hakekatnya yang memberi pelajaran berharga bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sementara LPBI NU hanyalah memberikan rumusan dan catatan agar terbaca oleh lebih banyak kalangan dan dapat dijadikan panduan oleh lebih banyak pesantren yang ingin mengikutinya.

Mewakili keluarga besar LPBI NU, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang selama ini telah memberikan kesempatan kepada LPBI NU untuk terus mengembangkan upaya pelestarian lingkungan hidup yang lebih baik. Tanpa mengurangi apresiasi kami kepada pesantren-pesantren lain yang juga berkontribusi atas buku ini, kami ingin secara khusus berterimakasih kepada pengasuh, para ustadz dan santri pesantren Ihya' ulumaddin Cilacap, Jawa Tengah yang selama ini telah bekerjasama dengan LPBI NU, bahkan dari pesantren ini



juga ide penulisan buku ini muncul. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Pondok Pesantren Annuqayyah Guluk-guluk, Sumenep, Madura, Darul Muttaqin Bogor dan Al-Yasini, Pasuruan. Pesantren-pesantren tersebut dengan sangat terbuka memberikan kesempatan kepada kami untuk menggali pengalaman mereka dan menuliskannya dalam buku panduan ini. Dari pesantren-pesantren inilah LPBI NU mendokumentasikan proses penghijauan, pengelolaan sampah, inisiasi energi baru terbarukan serta tata kelola air. Selanjutnya kami juga minta maaf jika ada hal-hal yang luput dari catatan kami atau proses kami mendokumentasikan masih ditemukan berbagai kekeliruan.

Apresiasi juga ingin kami sampaikan kepada tim penulis buku yang telah berjibaku selama proses berjalan. Dengan kesabaran dan ketelatenan tim ini melakukan wawancara, mengunjungi pesantren di berbagai daerah, menyelenggarakan pertemuan dan kerjasama antar pesantren selama kurang lebih satu tahun. Buku yang tampak sederhana ini adalah hasil dari sebuah kerja keras yang benar-benar patut diapresiasi. LPBI NU sebagai lembaga non-profit sangat menghargai semangat kerelawanan tim penyusunan buku ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pesantren yang telah menunjukkan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan LPBI NU dalam menjalankan program Pesantren Hijau. Kami berharap semoga inisiatif kecil ini dapat membawa berkah dan menjadi bagian penting bagi terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik.



Akhirnya, seraya memohon bimbingan dari Allah subhanahu wata'ala, kami membuka diri menerima masukan dari para pembaca untuk keberlangsungan program Pesantren Hijau di masa yang akan datang.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Oktober 2019

M. Ali Yusuf

Ketua LPBI NU



Manifesto Pesantren Hijau

LATAR BELAKANG

Persoalan lingkungan sudah tidak lagi dapat ditoleransi. Bukti-bukti akan kerusakan alam kini telah dapat disaksikan dengan mata telanjang. Laporan-laporan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang lingkungan maupun yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan telah begitu jelas menggambarkan bahwa hari ini alam telah rusak.

Greening the blue 2019, sebuah *project* lingkungan yang digagas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencatat bahwa saat ini 92% penduduk dunia tidak dapat menghirup udara bersih. *Greening the blue* juga mencatat bahwa polusi udara juga telah merugikan ekonomi global sebesar \$5 triliun per tahun. Lebih dari itu, polusi *ozone* pada level dasar juga diprediksikan akan mengurangi panen sebanyak 26% pada tahun 2030 (Blue, 2019).

Dalam konteks Indonesia, walaupun laju deforestasi sejak 2010 mengalami penurunan, karena laju deforestasi di Indonesia pada periode 2000-2010 melesat hingga 1,2 juta hektar hutan alam setiap tahun bahaya deforestasi masih mengancam. Hal ini terjadi karena pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggungjawab.

Semakin hari angka kerusakan semakin berlipat-lipat jumlahnya. Kerusakan lingkungan tersebut berdampak begitu jauh sampai pada lingkungan sosial terkecil sekali pun. Penambahan angka kerusakan tersebut tidak akan pernah berkurang selagi belum tumbuh kesadaran dari semua pihak



untuk memberikan kontribusinya demi lingkungan yang lebih baik.

Di luar persoalan-persoalan lingkungan yang begitu menakutkan, sebenarnya Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar terutama dalam hal keanekaragaman hayati dan energi alternatif. Fakta Alam Indonesia selain sebagai negara maritim dan hutan tropis adalah harta karun yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Pada keduanya tersimpan kekayaan yang menjamin warganya untuk memiliki ketahanan akan krisis lingkungan dan memungkinkan pengkayaan energi baru terbarukan.

Sebagai contoh, di alam Indonesia terdapat sekitar 25.000 spesies tumbuhan berbunga. Jumlah itu melampaui angka koleksi Amerika Selatan dan Afrika Barat. Sampai tahun 2001 Laboratorium Konservasi Tumbuhan, Fakultas Kehutanan IPB telah mendata tidak kurang dari 2039 spesies tumbuhan obat (Zuhud, 2009). Untuk itu *Pesantren Hijau* hadir sebagai respon produktif atas ancaman krisis lingkungan dan perubahan iklim berbasis pesantren.

Pesantren sebagai subkultur masyarakat Islam Nusantara telah dikenal sejak berabad-abad yang silam. Salah satu keistimewaan dari lembaga pendidikan tertua dalam sejarah Indonesia modern ini adalah karena komitmennya terhadap lingkungan di mana pesantren berada.

Sepanjang sejarahnya, pesantren hadir sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya pada bidang pendidikan, pesantren juga tampil sebagai tempat masyarakat berkeluh kesah dalam hal sosial, budaya bahkan dalam persoalan politik dan keamanan sekalipun. Keistimewaan pesantren ini yang akan menjadi kekuatan



dari program pesantren hijau ini, apalagi mengingat jumlah pesantren menurut data Kementerian Agama pada 2018 mencapai 28.194 pesantren.

Buku Fiqh Lingkungan memuat laporan EMIS yang mengungkapkan bahwa 78% atau 8.829 pesantren berada di daerah pedesaan (*Forest and Media Campaign* 2004). Selebihnya, jika ditinjau berdasarkan lokasinya, 2.429 pesantren berlokasi di daerah pertanian dan 1.546 di daerah pegunungan. Sekitar 50% pesantren berada di lokasi daerah permukiman. Terlepas dari secara geografis mayoritas pesantren berada di tengah masyarakat yang rawan menjadi korban kerusakan lingkungan, fakta tersebut juga merupakan potensi besar sebagai agen konservasi dan pusat gerakan ekologis.

Dasar Pemikiran Pesantren Hijau

MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH

Khalifah adalah jabatan manusia di muka bumi yang melekat sejak lahir. Khalifah atau dalam bahasa yang lebih sederhana dapat diartikan sebagai wakil Tuhan adalah bukan jabatan yang sederhana, melainkan amanah besar yang berkonsekuensi pada tanggung jawab menjaga bumi serta isinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَنْتَجِعُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا
لَا تَعْلَمُونَ



“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’.” (QS. Al-Baqarah: 30)

Doktrin dasar bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah ternyata memicu kontroversi di kalangan pegiat sains dan agama. Sebagian kelompok menilai bahwa posisi manusia sebagai khalifah berkonsekuensi munculnya sikap kontra produktif bagi kelestarian lingkungan.

Menurut kelompok ini, justifikasi khalifah berbuntut pada sikap merasa berhak melakukan apapun, termasuk melakukan eksploitasi terhadap lingkungan atas nama demi kebaikan manusia sebagai khalifah. Sikap apatis terhadap prinsip khalifah ini merupakan tantangan besar bagi masyarakat Islam untuk membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang pantas mengemban amanah menjaga kelestarian bumi serta isinya.

Di antara dalil-dalil ajaran Islam yang menjadi dasar anjuran maupun perintah untuk melakukan penghijauan dan menanam tumbuh-tumbuhan adalah:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ
رَوْحٍ بَهِيحٍ

“...Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (Al-Hajj [22]: 5)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ قَامَتْ
السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا



“Riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda: ‘Sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma maka apabila dia mampu menanamnya sebelum terjadinya kiamat maka hendaklah dia menanamnya.’” (HR. Imam Ahmad 3/183, 184, 191, Imam Ath-Thayalisi No.2068, Imam Bukhari di kitab Al-Adab Al-Mufrad no. 479 dan Ibnul Arabi di kitabnya Al-Mu’jam 1/21 dari hadits Hisyam bin Yazid dari Anas Ra.)

Selain dalil-dalil berdasarkan Alquran dan Sunnah, Ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaily dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juga mengatakan:

Manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan perintah dan seizin Syara’ (aturan agama). Maka dari itu, ia tidak boleh menggunakan haknya dengan cara yang menimbulkan mudarat (kerusakan, kerugian, bahaya) bagi orang lain, baik secara individual maupun secara komunal, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak. (Jilid IV, hal. 30).

Pada konteks ini, Fachruddin Mangunjaya (2013) mengingatkan bahwa Sahabat Umar Ibnu Khatthab yang menjadi menjadi Khalifah (586-644) di Madinah Semenanjung Arab telah memperkenalkan konsep tata kelola lingkungan dengan beberapa teori dasar:

1. Sumber daya alam akan terancam apabila dieksploitasi secara berlebihan;
2. Memperkenalkan konsep menghidupkan lahan mati di mana seseorang diperkenankan memanfaatkan lahan yang telah ditinggalkan pemiliknya untuk dikelola secara produktif;
3. Membangun konsep bahwa sumber daya adalah amanah dari generasi setelahnya, dan karenanya tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan;



4. Melakukan pemanfaatan tanah dengan mendistribusikan tanah yang tidak dipakai/digunakan oleh pemiliknya selama tiga tahun kepada masyarakat secara adil sehingga dapat menghasilkan produktivitas lahan yang baik.

GERAKAN INTERNASIONAL MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) menilai bahwa pelibatan lembaga pendidikan pada agenda pembangunan berkelanjutan adalah krusial. Hal ini mengingat betapa dampak pendidikan sangatlah berpengaruh pada hasil akhir pembangunan. UNESCO juga menekankan mengenai pembangunan berkelanjutan adalah tujuan akhir dari relasi manusia dan lingkungan.

Pada tahun 1977 tidak kurang dari 66 negara telah mendeklarasikan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus pada pelibatan institusi pendidikan pada kerja-kerja lingkungan. Pada pertemuan yang digagas oleh UNESCO-UNEP tersebut disepakati bahwa untuk memecahkan persoalan lingkungan dan mencegah munculnya kembali persoalan lingkungan, maka harus ada gerakan massif untuk menciptakan populasi manusia yang peduli terhadap lingkungan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan.

Untuk itu masyarakat harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, tingkah, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif untuk mengatasi persoalan lingkungan dan mencegah timbulnya masalah lingkungan yang baru (Sauvé, 1996).



Gayung kemudian bersambut, pada bulan April 2010 pemerintah Indonesia bersama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dari 14 negara, menjadi tuan rumah Konferensi Internasional pertama tentang aksi muslim menyikapi perubahan iklim. Dari konferensi tersebut dicapailah komitmen bersama untuk melakukan mitigasi perubahan iklim di negara masing-masing. Selain karena amanah teologis, konferensi tersebut juga membuat NU sebagai organisasi Islam terbesar terpanggil untuk menjadi ormas Islam yang terdepan dalam melakukan mitigasi lingkungan dan perubahan iklim.

AMANAH NU UNTUK KELESTARIAN ALAM

Anggapan sebagian publik selama ini masih ada memandang ormas Islam seperti NU hanya perhatian pada wilayah-wilayah keagamaan semata. Padahal berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926 yang digagas oleh para kiai pesantren adalah wujud kepekaan dalam merespon problematika zaman pada waktu itu. Di samping berawal dari polemik keagamaan, wilayah sosial, ekonomi, budaya dan politik juga dalam perkembangannya menjadi perhatian peran NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia.

Termasuk perhatian NU atas perubahan zaman adalah respon cepat terhadap isu-isu lingkungan yang belakangan ini statusnya semakin mengancam keberlangsungan hidup manusia. Respon tersebut dilakukan oleh kalangan NU—baik struktural maupun kultural—melalui berbagai cara, seperti lewat riset, diskusi, advokasi, hingga penggalan hukum (*istinbath*) dengan metode *bahtsul masail*.



Isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan alam dinilai sangat penting mengingat dunia industri berkembang begitu cepat, sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Virus penyakit, eksploitasi sumber daya alam, konflik sosial, bencana alam adalah sederet sisi lain dari dampak buruk industrialisasi terutama yang terjadi di negeri ini.

Barangkali, hampir tiap orang merasakan dampak tersebut, akan tetapi tidak banyak orang yang sadar untuk melakukan perubahan demi menanggulangi dampak yang lebih buruk lagi. Oleh sebab itu, NU mengambilkan beberapa langkah sebagai wujud peran aktifnya dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

NU sebagai organisasi yang berusia hampir 1 abad tentunya paham bahwa produk-produk yang dihasilkan dari dunia industri punya peran dalam membantu aktivitas manusia. Namun NU menyadari untuk tidak tinggal diam menyaksikan terhadap dampak buruk industrialisasi, apalagi mempertimbangkan masyarakat yang terkena dampak di daerah-daerah merupakan kantong basis-basis nahdliyin (jamaah NU).

KELESTARIAN ALAM DAN LANDASAN TEOLOGISNYA

Kalangan ulama NU memahami bahwa landasan tentang perintah menjaga lingkungan bagi kelestarian alam sudah termaktub dalam teks-teks suci Alquran, sebagaimana firman Allah pada beberapa ayat berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ



يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata: 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?' Tuhan berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. al-Syuara' [26]: 183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Al-Rum [30]: 41)

Melalui teks-teksi suci di atas Allah Ta'ala telah memperingatkan manusia agar tidak semena-mena terhadap apa saja yang ada di darat dan laut, sebab itu adalah larangan keras melakukan eksploitasi lingkungan alam.



MUNAS NU SOROTI ISU LINGKUNGAN

Begitu seriusnya pengurus NU merespon isu-isu lingkungan, sampai-sampai problem tersebut dibawa ke arena Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama pada akhir Februari 2019 di Pesantren Citangkolo, Banjar, Jawa Barat, yang merupakan forum tertinggi organisasi setelah forum Mukhtar setiap 5 tahun sekali. Isu tersebut diangkat karena muncul dari aspirasi masyarakat akar rumput yang terkena dampak langsung atas perusahaan yang melanggar regulasi pengolahan sumber daya alam.

1) Masalah Sampah Plastik

Dalam sidang bahtsul masail Komisi Waqiiyyah yang diikuti oleh para kiai perwakilan NU cabang, muncul pembahasan mengenai hukum membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik yang belakangan gencar dikampanyekan demi mengurangi penggunaan benda yang terbuat dari plastik.

Pendek kata, setelah para peserta sidang menyebutkan dalil-dalil beserta berbagai argumentasinya lalu mendisuksikannya, ditetapkan bahwa hukumnya “haram” membuang sampah plastik, apabila nyata-nyata (*tahaqquq*) atau diduga kuat (*dzan*) membahayakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Lalu bagaimana bolehkah pemerintah menerapkan sanksi kepada oknum yang membuang sampah sembarangan? Komisi ini menyepakati “diperbolehkan”, karena sanksi tersebut diterapkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*).



Sedangkan bagaimana hukum masyarakat memboikot produk perusahaan yang tidak mengelola dan menanggulangi sampah kemasan dan limbah produksinya?

Rinciannya, apabila dilakukan oleh perseorangan tanpa mengajak orang lain, maka hukumnya “diperbolehkan”, lalu apabila tindak boikot dilakukan dengan melibatkan massa baik secara massif ataupun dengan disertai aksi unjuk rasa, maka hukumnya diperbolehkan dengan empat ketentuan, yakni (1) mendapatkan izin pemerintah, (2) dinilai sebagai alternatif terbaik dalam menyikapi kemungkaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan, (3) tidak disertai dengan umpatan-umpatan kasar atau fitnah, (4) tidak ada paksaan terhadap masyarakat untuk ikut aksi boikot.

2) Masalah AMDK dan Sumur Mengering

Pada kasus lain, perusahaan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang beroperasi, namun keberadaannya mengakibatkan mengecilnya debit air di sumur-sumur milik warga dan bahkan ada yang sampai kering, sehingga mengakibatkan kebutuhan air untuk masyarakat tidak tercukupi.

Munculnya beberapa pertanyaan, bagaimana hukum mengambil air dalam jumlah besar yang dilakukan perusahaan untuk usaha AMDK yang mengakibatkan debit air sumur masyarakat dan sumber air semakin mengecil bahkan menjadi kering?

Komisi Waqiiyyah Munas NU ini menyepakati hukumnya “haram” apabila berkurangnya debit air atau



mengeringnya sumur milik masyarakat secara nyata-nyata (*tahaqquq*) merupakan dampak dari pengeboran pihak perusahaan AMDK yang melebihi kapasitas (*mukhalif lil 'adat*).

Sedangkan soal status hukum, pemerintah “tidak boleh” memberi izin usaha apabila sudah yakin akan terjadinya dampak sebagaimana fakta yang terjadi. Sedangkan memberi izin usaha AMDK dari sumber air yang digunakan masyarakat umum hukumnya “haram”.

Di samping itu, pemerintah juga wajib mencabut izin usaha perusahaan AMDK apabila pencabutan tersebut menjadi satu-satunya jalan *izalatud dharar* (menghilangkan dampak negatif) yang terjadi.

Respon NU tidaklah musiman mengikuti tren, jauh sebelum Munas NU 2019 yakni pada pagelaran Mukhtamar NU ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, 1-5 Desember 1994, sudah dibahas masalah pencemaran lingkungan oleh para kiai dan sarjana NU.

Kasus yang diangkat adalah industrialisasi yang dahulu sedang digalakkan oleh pemerintah, ternyata membawa eksekusi yang cukup serius, dan dampaknya juga merugikan kepentingan rakyat banyak, yakni biasanya hanya mengejar keuntungan sendiri, serta melupakan kewajiban untuk menangani dampak limbah yang ditimbulkan oleh pabrik.

Muktamirin pada momen itu menyepakati bahwa mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan bahaya (*dharar*), maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*). Hal



itu berlandaskan konsepsi Islam dalam menangani eksekusi pencemaran lingkungan yang menyatakan apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar, dan pihak berwenang memberikan hukuman yang menjerakan (terhadap pencemar) yang pelaksanaannya dengan *amar ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan tingkatannya.

PRINSIP DAN REKOMENDASI

Bagi kalangan kiai NU, forum bahtsul masail tidaklah sebatas ajang adu argumentasi dan adu kepintaran dalam memahami teks-teks keilmuan Islam, namun forum itu selain untuk jawaban atas masalah di kalangan jamaah dan masyarakat pada umumnya, sudah menjadi tradisi NU untuk mengawal pemerintah melalui rekomendasi-rekomendasi dari hasil bahtsul masail.

Tentu saja, rekomendasi-rekomendasi yang diajukan tersebut bertujuan sebagai landasan teologis (keagamaan) bagi pemegang regulasi yakni pemerintah dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Rekomendasi semacam ini dinilai sangat sakral dan strategis sebagai upaya mengawal pemerintah agar tetap sasaran dan menghindari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang kekuasaan.

MENINJAU FATWA MUI

Selain NU, lembaga keagamaan yang aktif mengeluarkan fatwa seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga pernah mengeluarkan fatwa Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan



Lingkungan. Fatwa ini juga lahir tatkala problem pencemaran dan eksploitasi alam sudah massif di kantong-kantong sumber daya alam di tanah air.

Melalui proses panjang, MUI menetapkan fatwa yang berisikan:

- 1) setiap muslim “wajib” menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*;
- 2) Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya “haram”;
- 3) Pemerintah dan Pengusaha “wajib” mengelola sampah guna menghindari kemudaratn bagi makhluk hidup;
- 4) Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya “wajib kifayah”.

Dalam menangani isu-isu lingkungan untuk kelestarian alam, baik NU, MUI maupun lembaga keagamaannya lainnya, tentu saja mereka punya peran termasuk memberikan berbagai prinsip dan landasan teologis kepada jamaahnya agar lebih sadar untuk peduli kembali terhadap lingkungan di sekitarnya. Karena, sebagian dijelaskan di atas, agama Islam sendiri sudah jelas bahwa merawat dan menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari ajaran utama agama Islam.

Peran-peran keagamaan yang demikian dipandang sangat penting agar regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam merawat kelestarian alam dapat terlaksana dengan baik untuk melestarikan alam Indonesia sebagai negeri yang *gemah lipah loh jinawi*.



Inisiatif Pesantren Hijau

TAKRIF PESANTREN HIJAU

Pesantren Hijau adalah adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah proses yang dijalankan oleh pondok pesantren sebagai ikhtiar untuk menjaga kelestarian lingkungan pesantren. Upaya menjaga kelestarian lingkungan tersebut setidaknya tercermin dalam tiga rangkaian kegiatan yaitu pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah dan pengupayaan energi alternatif.

SIAPA DAN BAGAIMANA PESANTREN HIJAU

Pesantren manapun berhak mengklaim dirinya sebagai pesantren hijau jika memiliki wawasan lingkungan dan melakukan upaya kelestarian lingkungan seperti yang tertuang dalam takrif Pesantren Hijau. Namun demikian, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) sebagai inisiator mengajak segenap pesantren yang bernaung di bawah bendera NU untuk melakukan aktivitas ini bersama-sama.

Dengan demikian, agar upaya melestarikan lingkungan melalui pesantren ini berjalan lebih terukur, LPBI akan melakukan pencatatan dan pendampingan bagi-pesantren-pesantren yang memiliki komitmen serius untuk bekerjasama mengembangkan pesantren hijau bersama LPBI-NU.

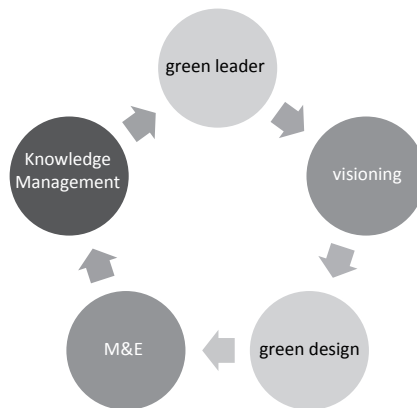
Pesantren-pesantren mitra LPBI selanjutnya, setelah melalui *system assessment*, akan diberikan label “Pesantren Hijau”. Melalui pelabelan ini kemudian para pihak yang memiliki



komitmen serupa dapat lebih mudah untuk melakukan kerja sama dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun.

KEMANA PESANTREN HIJAU BERLABUH?

Tujuan akhir dari pesantren hijau adalah terciptanya lingkungan pesantren yang asri, memberi manfaat ekologis bagi masyarakat pesantren dan melahirkan alumni pesantren yang memiliki kepekaan pada krisis lingkungan. Lebih jauh dari itu, pesantren hijau diharapkan dapat melahirkan dokumen rekaman proses menuju pesantren berwawasan khazanah lingkungan dan dapat menjadi tujuan belajar pesantren-pesantren lain yang ingin mengikuti jejak kesuksesannya membangun pesantren hijau.



AKTIVITAS KUNCI PROGRAM PESANTREN HIJAU:

1. Membangun “kepemimpinan hijau”
2. Sinkronisasi visi
3. Desain tata kelola pesantren hijau
4. Monitoring dan evaluasi
5. Dokumentasi proses belajar



0.1 Membangun Kepemimpinan Hijau

Prinsip “memimpin dengan contoh” adalah prinsip yang harus ditanamkan dalam seluruh rangkaian program pesantren hijau. Sebelum program ini dijalankan di pesantren mitra, perspektif pimpinan pesantren dan penanggung jawab harus telah berkomitmen untuk selalu menjadi pemimpin yang memiliki perspektif berkelanjutan serta dapat menjadi contoh bagi seluruh komponen di bawahnya.

Terwujudnya seorang pemimpin yang bisa dicontoh tentu saja bukan sesuatu yang instan. Untuk mewujudkannya, maka LPBI akan memfasilitasi komunitas pemimpin berkelanjutan melakukan beberapa proses berikut:

- 1) Workshop memahami konsep kepemimpinan berkelanjutan.
- 2) Membangun “statemen visi dan misi pemimpin” bersama yang secara tegas dan jelas memuat frasa yang menunjukkan komitmen penuh terhadap praktik berkelanjutan.
- 3) Menginisiasi praktik kebiasaan-kebiasaan baru yang mencerminkan sikap sebagai keberlanjutan.
- 4) Secara berkala LPBI dan komunitas pemimpin berkelanjutan akan melakukan “*self assessment*” dan melakukan mekanisme saling berbagi pengalaman dan saling mengingatkan pada visi dan misi berkelanjutan melalui berbagai media.

0.2 Sinkronisasi visi

Setiap pondok pesantren sudah barang tentu memiliki visi mereka sendiri. Sebuah visi biasanya dibangun dari sejarah panjang proses berdirinya sebuah pesantren serta cita-cita



luhur para pendiri dan realitas sosial di mana pesantren tersebut berdiri.

Visi yang dijalankan secara konsisten tentu saja akan mengakar kuat dan memberikan pengaruh besar bagi tata kelola serta keluaran sebuah pesantren. Pondok pesantren dengan visi pengabdian misalnya, akan mendasarkan segala aktivitasnya pada orientasi pengabdian.

Kendati tidak sama sekali abai dengan capaian-capaian akademik keluarannya, pesantren seperti ini biasanya jauh lebih menghargai santrinya yang mendedikasikan diri pada komunitas dan bukan capaian individu. Demikian juga pesantren yang memiliki visi keunggulan dan prestasi akan cenderung mengerahkan segenap daya dan upaya agar santri-santrinya menjuarai berbagai kompetisi.

Demikianlah visi memberi pengaruh kuat pada proses berkembangnya sebuah pesantren. Sinkronisasi visi pesantren hijau bukanlah sebuah upaya untuk mengubah visi pesantren mitra, sinkronisasi juga tidak dimaksudkan untuk menyamakan visi seluruh pesantren mitra menjadi seragam, melainkan untuk memberikan warna baru pada visi yang telah mapan sebagai upaya memberikan nilai tambah.

Sinkronisasi visi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan untuk mencapai sebuah pemahaman yang sama bahwa kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Sinkronisasi visi dilakukan agar seluruh elemen dari tingkatan paling atas sampai paling bawah memahami manfaat hidup berkelanjutan.



Melalui pertemuan berseri LPBI akan memfasilitasi pesantren mitra untuk menumbuhkan kepekaan terhadap persoalan lingkungan kepada setidaknya empat komponen utama pesantren, pengasuh, santri serta para pengurus dan guru. Selain itu, sinkronisasi visi juga akan memberikan ruang kepada seluruh elemen pesantren untuk mengenal lebih dekat lagi seluruh rangkaian proses pesantren hijau. Dengan demikian program pesantren hijau akan mendapatkan dukungan seluruh komponen pesantren.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses sinkronisasi sebagai berikut;

- 1) LPBI Bersama pesantren melakukan penandatanganan naskah kerja sama dan mengumumkan kepada seluruh komponen utama pesantren yaitu pengasuh, guru, pengurus dan santri.
- 2) Tim inti pesantren hijau dari pihak pesantren akan melakukan sosialisasi secara massif melalui berbagai media pesantren seperti majalah, pamflet, dan edaran.
- 3) Pengurus, guru dan santri senior pada periode tertentu akan selalu mengingatkan akan dijalankannya program pesantren hijau dalam setiap kesempatan.
- 4) Pesantren membuat satu pernyataan yang berisi pesan komitmen atas program pesantren hijau mudah diingat serta menjadikannya sebagai bagian dari ikon pesantren yang muda dilihat.



0.3 Desain tata kelola pesantren hijau

Desain tata kelola pesantren hijau adalah rancang bangun yang memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana pesantren hijau diwujudkan dan langkah apa yang akan dilakukan demi menjamin aktivitas ini berjalan Dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan target yang ditetapkan.

1) . Partisipatif dan sinergi

Pesantren adalah ruh dari proyek pesantren hijau. Karenanya, walaupun inisiator program ini adalah LPBI tetapi hakekatnya inspirasi datang dari keseriusan beberapa pesantren untuk mewujudkan lingkungan yang lestari. Sebelum program ini diluncurkan, LPBI telah terlebih dahulu membangun komunikasi dengan banyak pesantren yang telah memulai menjalankan program-program pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks inilah proyek ini didesain separtisipatif mungkin dengan menghargai segala keunikan yang dimiliki oleh pesantren mitra.

Selain partisipatif proyek ini juga diharapkan dapat menjadi pusat sinergi antarjaringan pesantren hijau. Secara berkala LPBI akan berusaha mempertemukan para pengelola pesantren hijau untuk dapat bertemu, berkunjung dan saling belajar satu sama lain.

LPBI akan melakukan *profiling* pesantren hijau untuk kemudian diklasifikasikan sesuai dengan proyeksi pengembangan, tata kelola sampah, tata kelola air dan inisiatif energi baru terbarukan. Dalam proses profiling pesantren akan berpartisipasi aktif untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai pengembangan energi.



2) . Kreatif dan terbuka

Pesantren hijau adalah proyek pelestarian lingkungan berbasis pesantren yang terbuka atas segala bentuk kreativitas serta menghargai perbedaan dan potensi lokal. Sebagai penggagas, LPBI akan memberikan asistensi dan memberikan panduan generik berupa prinsip-prinsip dan langkah-langkah dasar.

Selanjutnya LPBI menghargai kreativitas pesantren mitra untuk secara teknis mengembangkan dan menggali sumber daya dengan caranya masing-masing. Keragaman model tata kelola ini kemudian akan didokumentasikan menjadi sebuah “knowledge management” yang akan memperkaya khazanah pesantren hijau. Dokumentasi proses pesantren hijau dan kisah sukses itu kemudian akan memberikan alternatif sumber pengetahuan bagi pesantren lain untuk menjalankan program pesantren hijau selanjutnya.

3) . Pemilihan pesantren mitra (pilot)

Pada prinsipnya pemilihan pesantren yang akan menjadi pilot program ini didasarkan pada kesediaan pesantren dan kemampuan sumber daya LPBI untuk mendukung program tersebut. Melalui mekanisme *open application* LPBI akan melakukan seleksi dan *assessment* kepada pesantren-pesantren yang telah mengajukan formulir komitmen untuk melakukan kerja sama pengembangan pesantren hijau.

Secara garis besar, pondok pesantren yang akan dipilih menjadi mitra adalah pesantren yang *pertama* bernaung di bawah bendera NU atau anggota RMI, *kedua* telah sebelumnya memiliki inisiatif sebagai pesantren



berkelanjutan yang dibuktikan dengan adanya setidaknya salah satu indikasi telah mengelola sampah, memiliki tata kelola air, pengkayaan energi baru terbarukan atau memasukkan perspektif lingkungan secara jelas dalam kurikulum pembelajaran.

4). Taskforce

Taskforce atau gugus tugas adalah sekelompok orang dari berbagai latar belakang yang bersama-sama memikul tanggung jawab dan memastikan seluruh proses terselenggara program pesantren hijau berjalan ideal. Sifat dasar dari gugus tugas adalah komitmen dan kerelawanan. Dengan begitu, setiap pesantren mitra diminta untuk menyediakan sejumlah orang untuk menjadi relawan yang berkomitmen bagi kesuksesan program pesantren hijau.

LPBI sebagai penggagas program pesantren hijau tidak memberikan syarat khusus bagi calon anggota gugus tugas. Namun demikian, LPBI menyarankan agar pihak pesantren memilih calon anggota yang mempunyai rekam jejak memiliki perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan. Selain rekam jejak calon diharapkan memiliki waktu luang yang dapat didedikasikan untuk program pesantren hijau.

0.4 Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah sebuah upaya untuk memantau dan melakukan tinjauan setiap tahapan proses yang menjamin semua proses berjalan ideal. Kegiatan monitoring dan evaluasi didasarkan pada naskah perencanaan, tujuan umum dan husus program pesantren



hijau dan beberapa mekanisme lain yang telah disepakati oleh para pihak internal dan eksternal.

0.5 Dokumentasi proses belajar.

LPBI, BSN dan Komitmen Pesantren

Tiga Komponen Pesantren Hijau

1. TATA KELOLA SAMPAH

Sampah adalah benda apapun yang telah dibuang oleh pemiliknya. Sampah bisa berupa apa saja baik perabotan rumah tangga, sisa bahan-bahan produksi atau bahkan makanan atau minuman. Sejauh pengamatan LPBI sampah yang banyak ditemukan di pesantren adalah pakaian santri, alat baca tulis, bekas bungkus makanan atau bungkus kebutuhan pribadi seperti sabun dan deterjen.

Mengelola sampah adalah hal yang sangat penting, tidak hanya untuk kepentingan keindahan ruang melainkan juga untuk menghindarkan pesantren dari berbagai *mudharat* yang mungkin akan muncul akibat sampah. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan pesantren adalah plastik bekas deterjen.

Plastik adalah benda yang tidak mudah diurai secara alamiah. Sebagian ahli bahkan menyebutkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengurai plastik adalah tidak kurang dari 450 tahun. Bahaya plastik bekas deterjen juga berpotensi semakin mengancam jika berinteraksi dengan zat kimia terkandung dalam sampah yang lain pada pembuangan sampah ahir.



Sampah yang dikelola secara baik dan benar akan mendatangkan keuntungan bagi pesantren, keuntungan terhindar dari bahaya sampah atau bahkan keuntungan finansial. Lain halnya jika sampah dibiarkan tanpa tata kelola yang baik, maka ia akan mendatangkan *mudharat*. Mudharat sampah bisa bermacam-macam bentuk dan tingkatan.

Bahkan, pada kadar tertentu dapat berdampak pada rendahnya kualitas proses belajar-mengajar di pesantren. Tumpukan sampah dapat memperburuk kualitas udara, bau yang mengganggu atau bahkan virus yang berpotensi mengganggu kesehatan santri.

Sebenarnya manusia secara alamiah telah menemukan cara mengelola sampahnya. Orang-orang terdahulu membuat lubang-lubang besar untuk mengumpulkan sampah kemudian memendam atau membakarnya. Perkembangan zaman kemudian membuat volume produksi sampah semakin tak terkontrol. Jenis-jenis sampah juga semakin tidak bisa dikenali secara baik oleh orang kebanyakan.

Adapun dilihat dari jenisnya, spesifikasi sampah terbagi meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. dan lain-lain.

Sedangkan karakteristik sampah dalam pengelolaan sampah dibedakan atas:



a. Sampah Organik

Sampah organik atau sampah basah atau sampah hayati adalah jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami.

Contohnya adalah sampah sisa dapur, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan, nasi, dan potongan rumput/ daun/ ranting dari kebun.

b. Sampah An-Organik

Sampah anorganik atau sampah kering atau sampah non-hayati adalah sampah yang sukar atau tidak dapat membusuk, merupakan sampah yang tersusun dari senyawa nonorganik yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.

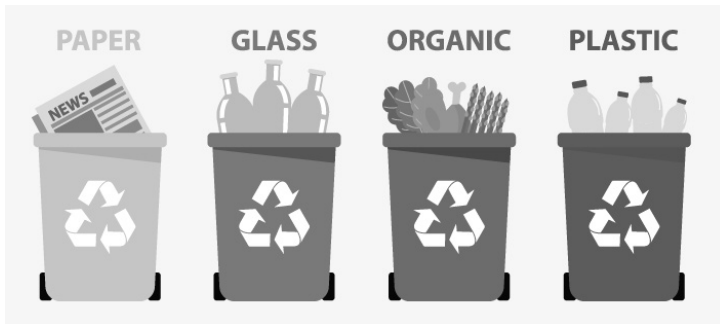
Contohnya adalah botol gelas, plastik, tas plastik, kaleng, dan logam. Sebagian sampah non-organik tidak dapat diuraikan oleh alam sama sekali, dan sebagian lain dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Mengolah sampah non-organik erat hubungannya dengan penghematan sumber daya alam yang digunakan untuk membuat bahan-bahan tersebut dan pengurangan polusi akibat proses produksinya di dalam pabrik.

Mengelola sampah adalah kegiatan yang difokuskan untuk meminimalisir dampak negatif dari sampah. Tata kelola sampah harus dimulai dengan menciptakan gaya hidup sadar bahaya sampah yang tercermin dalam sikap-sikap sebagai berikut;

- 1) Berusaha untuk tidak menambah, memproduksi atau membeli benda apapun kecuali sangat dibutuhkan.



- 2) Berusaha untuk membuat umur keterpakaian barang lebih lama.
- 3) Secara kreatif memanfaatkan barang-barang bekas untuk difungsikan kembali.
- 4) Jika harus membuang sesuatu atau benda apapun maka senantiasa membuang dengan memilahnya sesuai golongan; plastik, kertas, metal, cairan, dan organik.



1.2 INFRASTRUKTUR

Setidaknya ada 3 titik di mana aktivitas pengelolaan sampah di lingkungan pesantren diperlukan penanganan khusus agar terkelola dengan efisien dan rapi.

1. Pojok Sampah Asrama (PSA)
Mayoritas bangunan pesantren terbagi atas asrama-asrama yang biasanya terdiri dari kamar, dapur, kelas, ataupun aula pembelajaran. Di setiap asrama inilah harus disediakan alat-alat menunjang, seperti sapu, pengki, tong sampah yang sudah terlabeli nama kategori jenis-jenis sampah.



2. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Sampah-sampah yang sudah dibuang di pojok-pojok asrama pada poin 1 kemudian dibawa ke lokasi atau bangunan kecil sebagai TPS untuk dikumpulkan untuk dipilah kembali agar benar-benar sesuai kategori sampah, lalu dimasukkan dalam karung-karung khusus. TPS sebaiknya terpasang atap agar terhindar dari hujan dan dijauhkan dari lokasi asrama agar terhindar bau yang menyengat.

3. Bank Sampah Pesantren (BSP)

Sampah-sampah sudah dikategorikan jenisnya dalam karung atau kantong plastik besar kemudian di bawa ke bank sampah yang sudah dibangun khusus. Di tempat inilah sampah-sampah tersebut akan dikelola sendiri oleh pesantren berdasarkan jenisnya. Contohnya sampah kertas, plastik dan pecahan kaca dibuat menjadi kerajinan, sedangkan sampah organik didaur menjadi pupuk kompos yang diolah menggunakan alat-alat khusus.

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam proses tata kelola sampah pesantren, selain kesadaran masing-masing individu, diperlukan pula manajemen yang terstruktur agar dapat mengawasi dan mengelola sampah pesantren secara terorganisir. Sehingga tata kelola tersebut membutuhkan struktur sumber daya manusia sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas, terdiri dari kiai/ustad dan lurah pondok yang mengawasi Tim Pengelola Sampah Pesantren;
- b. Direktur Tim, dipilih dari unsur ustad/santri yang



- bertugas mengatur dan menjalankan tata kelola sampah pesantren bersama stafnya;
- c. Bagian Pengangkut Sampah, terdiri dari beberapa santri yang bertugas mengangkat kantong/karung sampah yang sudah penuh dari pojok asrama ke tempat pembuangan sementara (TPS);
 - d. Bagian Pemilah Sampah, terdiri dari beberapa santri dan petugas kebersihan yang bertugas memilah sampah di TPS agar sesuai dengan jenis-jenisnya, lalu diangkut ke tempat Bank Sampah Pesantren (BSK) untuk didaur ulang;
 - e. Bagian Pendaur Ulang, terdiri dari santri dan petugas pengrajin yang bertugas mendaur ulang jenis-jenis sampah yang masih layak dimanfaatkan untuk barang-barang kerajinan atau pupuk kompos.

1.4 KEBIJAKAN PESANTREN

Untuk mendukung jalannya tata kelola sampah pesantren, pengurus atau pengasuh pesantren perlu membuat kebijakan khusus seperti:

- a. Buang sampah tidak hanya sebagai aktivitas sehari-hari semata, namun juga sebagai manajemen tata kelola sebagai program kerja pesantren;
- b. Memberikan pemahaman dasar agama, bahwa selain membuang sampah dan menjaga kebersihan, mengelola sampah juga bagian dari ajaran Islam;
- c. Membentuk tim/manajemen khusus yang terdiri dari petugas, pembina, dan santri untuk mengawasi dan mengelola sampah;
- d. Memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang membuang sampah sembarangan;



- e. Memberikan penghargaan bagi santri atau asrama yang paling bersih atau taat dalam aturan pengelolaan sampah;
- f.. Menjadikan tata kelola sampah sebagai sarana pendapatan kas pesantren;
- g. Memberdayakan masyarakat sekitar pesantren agar ikut serta dalam tata kelola sampah milik pesantren.

1.5 PROSEDUR

Untuk merealisasikan program Menuju Pesantren Hijau, ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan oleh pihak pesantren, yakni:

1. meneliti dengan cara mencari tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh pesantren, sehingga bisa diketahui apakah memiliki potensi di bidang tata kelola Air, Daur Ulang Sampah, Energi Baru Terbarukan, atautkah Ruang Terbuka Hijau;
2. memusyawarahkan bersama pengurus pesantren dan pengurus santri tentang potensi tata kelola mana yang sebaiknya dikembangkan sebagai program Menuju Pesantren Hijau;
3. mengajukan kepada pihak LPBI agar selanjutnya dapat disurvei apakah potensi pesantren tersebut layak atautkah tidak untuk dibangun program tata kelola sesuai dengan potensinya;
4. jika dinilai layak berdasarkan lokasi, SDM, dan kesiapan pesantren, pihak LPBI kemudian akan membuat persiapan-persiapan bersama pihak-pihak terkait;



2. TATA KELOLA AIR (SANITASI)

Pengelolaan air merupakan bagian penting dalam rangka menjaga kelestarian kebutuhan manusia terhadap sumber kehidupan tersebut, di mana saat ini mulai terancam dengan munculnya krisis air bersih akibat penggunaan yang berlebihan, pencemaran dan kerusakan sumber-sumber mata air.

Dalam hal ini, pesantren yang rata-rata dihuni banyak santri mempunyai peran mengkonsumsi jumlah air yang tidak sedikit. Sehingga sudah sepatutnya pesantren mengambil peran untuk ikut serta bertanggungjawab dalam mengelola air agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, tidak hanya hari ini namun untuk generasi selanjutnya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai literatur fiqh, Islam sangat perhatian terhadap isu air, hal ini sebab peribadatan tidak lepas dari yang namanya suci, di mana lumrahnya air sebagai alat utama bersuci. Ilmu fiqh sendiri pada umumnya mengklasifikasikan air dalam 4 jenis, yakni air suci yang menyucikan (*thahir muthahhir*), air suci yang tidak menyucikan (*thahir ghairu muthahhir*), air najis (*mutanajjis*), dan air yang makruh (*musyammas*).

Berdasarkan pembagian tersebut, jenis-jenis air yang lumrahnya berada di area pesantren di antaranya:

- a. air suci dari sumur, empang/kolam, pancuran, atau sumber mata air lainnya;
- b. air bekas wudlu di mushalla/masjid pesantren yang *musta'mal*;
- c. air bekas mandi dan cucian pakaian santri yang najis,
- d. dan lain-lain.



2.1 INFRASTRUKTUR

Pada dasarnya, jenis-jenis air dari hasil penggunaan di lingkungan pesantren dapat dikelola melalui sistem filtrasi. Namun, pemanfaatan yang paling mudah dijangkau adalah air bekas wudhu. Filtrasi untuk volume air jenis ini sangat melimpah, lantaran setiap hari digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, seperti hendak shalat, tadarus, belajar, dan lain-lain.

Prinsip sistem filtrasi air wudhu adalah mendaur ulang air bekas wudhu menjadi air siap pakai yang nonkonsumtif. Air ini juga termasuk belum terkontaminasi bahan kimia, jadi bisa menggunakan filtrasi sederhana untuk mengelola air bekas wudhu tersebut.

Paling tidak ada 3 hal utama yang perlu disiapkan:

- 1) Tempat semacam kolam yang diberi dasaran batu-batu kali, berfungsi untuk mengendapkan aliran air bekas wudhu;
- 2) Alat filtrasi (penyaring) yang terdiri dari materi seperti batu/pasir zeolit, kerikil, pasir, arang, dan batok kelapa. Alat ini berguna untuk menyaring air hasil endapan agar bau, warna, rasanya hilang sehingga air kembali jernih;
- 3) Bak penampungan besar (lebih dari 2 *qullah* [lebih dari 60 cm kubik]) berguna sebagai tempat penampungan air yang telah melewati alat filtrasi, sehingga air bekas wudhu yang dihukum *musta'mal* bisa kembali digunakan untuk bersuci.

Dalam proses filtrasi ini, teknologi pengelolaan air ini memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari riset, tata kelola, adaptasi teknologi, evaluasi dan pemeliharaan jangka panjang.



2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam tata kelola air di lingkungan pesantren, jika hanya mengambil peran untuk pemanfaatan air bekas wudhu tidaklah membutuhkan banyak sumber daya manusia. Oleh karenanya, setelah dipasang alat dan infrastruktur yang sudah dipasang oleh ahli atau pun masyarakat pesantren sendiri, lalu dibutuhkan beberapa orang yang sudah terlatih untuk ditugaskan untuk:

- a. Dewan Pengawas, dapat terdiri dari ustad/kiai dan lurah pondok yang bertugas mengawasi Tim Program Tata Kelola Air;
- b. Direktur Tim Program, diangkat dari unsur ustad/santri yang bertugas untuk mengatur dan menjalankan tata kelola air bersama para staf/anggotanya;
- c. Bagian teknisi, bertugas memelihara alat filtrasi agar sesuai dengan prosedur kerjanya;
- d. Bagian kebersihan, bertugas membersihkan kolam/bak dan alat agar tidak ada benda-benda lain yang menyumbat pada saluran filtrasi.

2.3 KEBIJAKAN PESANTREN

Untuk menyukseskan tata kelola air di lingkungan pesantren, ada kebijakan yang perlu dilakukan oleh pihak pengurus/pengasuh pesantren:

- a. Memberikan pemahaman kepada para santri bahwa pemanfaatan air bekas merupakan bagian dari ajaran Islam dalam rangka menghindari penggunaan air berlebihan (*israf*) dan merawat sumber daya alam agar tetap lestari serta mengurangi risiko krisis air bersih di kemudian hari;



- b. Membentuk tim/manajemen khusus yang terdiri dari petugas, pembina, dan santri untuk mengawasi dan mengelola filtrasi air wudhu atau jenis air lainnya;
- c. Menyediakan sarana filtrasi air yang dibangun di area masjid/mushalla atau pusat tempat berwudhu bagi para santri;
- d. Memberi inspirasi masyarakat sekitar pesantren untuk bersama-sama mengaggas masjid/mushalla *Go Green*.

2.4 PROSEDUR

Untuk merealisasikan program Menuju Pesantren Hijau, ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan oleh pihak pesantren, yakni:

1. meneliti dengan cara mencari tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh pesantren, sehingga bisa diketahui apakah memiliki potensi di bidang tata kelola Air, Daur Ulang Sampah, Energi Baru Terbarukan, ataukah Ruang Terbuka Hijau;
2. memusyawarahkan bersama pengurus pesantren dan pengurus santri tentang potensi tata kelola mana yang sebaiknya dikembangkan sebagai program Menuju Pesantren Hijau;
3. mengajukan kepada pihak LPBI agar selanjutnya dapat disurvei apakah potensi pesantren tersebut layak ataukah tidak untuk dibangun program tata kelola sesuai dengan potensinya;
4. jika dinilai layak berdasarkan lokasi, SDM, dan kesiapan pesantren, pihak LPBI kemudian akan membuat persiapan-persiapan bersama pihak-pihak terkait;



3. ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)

Energi yang digunakan orang sehari-hari pada umumnya bersumber dari listrik dan bahan bakar minyak. Namun, pada kenyataannya kedua sumber energi tersebut tidaklah murah, jumlahnya terbatas, dan seringkali menyebabkan kerusakan habitat alam. Makanya, Energi Baru Terbarukan (EBT) kini menjadi alternatif kebutuhan energi, di samping juga dalam rangka menjadi kelestarian alam.

Energi baru terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga arus air, proses biologi, dan panas bumi. Pemanfaatan energi ini dinilai penting karena demi keberlangsungan hidup di masa depan, sehingga banyak kalangan yang sudah memulai mengembangkan dan menggunakan.

Prinsip dasarnya energi baru terbarukan adalah:

- a. Mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat pembangkit energi;
- b. peningkatan pemanfaatan energi terbarukan;
- c. peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi;
- d. gaya hidup pengurangan polusi.

Sementara itu, lembaga pendidikan seperti pesantren dapat memanfaatkan energi baru terbarukan karena selama ini pemakaian energi di lingkungan pesantren tidaklah sedikit. Ada beberapa cara menghemat energi di lingkungan pendidikan seperti pesantren atau sekolah, di antaranya:

- a. Tidak terlalu sering menggunakan AC untuk ruangan kelas, sebab bisa juga memanfaatkan ventilasi udara alami;
- b. Larangan mengisi baterai ponsel di kelas, lantaran banyak pelajar yang membawa;



- c. Menyalakan komputer dan perangkat-perangkat lain di laboratorium pada saat hendak digunakan saja.

Memang tidak semua hasil temuan dan teknologi energi baru terbarukan bisa diterapkan, tapi ada beberapa jenis yang umumnya bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi di lingkungan pesantren, seperti halnya:

- a. Tenaga surya, yakni energi yang bersumber sinar cahaya matahari;
- b. Tenaga biogas; yakni energi yang bersumber kotoran manusia atau hewan ternak;
- c. Tenaga arus air; yakni energi yang bersumber dari aliran air sungai, air terjun, bendungan.

3.1 INFRASTRUKTUR

Pengadaan infrastruktur tenaga baru terbarukan membutuhkan finansial yang tidak sedikit. Biasanya selain murni dibangun secara mandiri oleh pengelola pesantren, ada juga beberapa pesantren yang mendapatkan bantuan pembangunan sumber energi alternatif dari lembaga swasta atau pemerintah.

3.1.1 TENAGA BIOGAS

Pembangunan infrastruktur tenaga biogas di area pesantren membutuhkan beberapa hal yang mesti disiapkan, di antaranya:

- Sentralisasi pembuangan limbah kotoran manusia/hewan ternak dari WC/kandang hewan ke dalam reaktor atau *septic tank* yang besar dan hampa udara;
- Pipa besi untuk menyalurkan gas limbah;



- . Alat penyimpan (drum) gas yang biasanya terbuat dari besi atau seng;
- . zeofilter, alat yang berfungsi untuk meningkatkan energi biogas melalui pemurnian kandungan gas;
- . Kompresor untuk mengalirkan gas ke kompor dan alat memasak lainnya.

3.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam tata kelola penggunaan energi baru terbarukan memang tidaklah sederhana, harus ada tim ahli terkait agar infrastruktur yang dibangun benar-benar aman dan sesuai prosedurnya. Namun, dalam hal itu tim pengelola energi yang terdiri dari unsur penghuni pesantren perlu dibekali keterampilan khusus sehingga nantinya dapat mandiri menjalankan teknologi energi tersebut.

Maka dari itu, dibutuhkan susunan tim/manajemen tata kelola energi baru terbarukan yang terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas, dapat terdiri dari ustad/kiai dan lurah pondok yang bertugas mengawasi Tim Program Tata Kelola Energi Baru Terbarukan;
- b. Direktur Tim Program, diangkat dari unsur ustad/santri yang bertugas untuk mengatur dan menjalankan tata kelola energi baru terbarukan bersama para staf/anggotanya;
- c. Bagian teknisi, bertugas memelihara alat-alat dan bangunan agar sesuai dengan prosedur kerjanya;



3.2 KEBIJAKAN PESANTREN

Kebutuhan setiap pesantren akan energi listrik dan gas tidaklah sedikit, mengingat kuantitas antri yang mencapai puluhan sampai belasan ribu santri. Oleh sebab itu, pihak pengurus/pengasuh pesantren dapat menentukan beberapa kebijakan yang strategis, di antaranya:

- a. Memberikan pemahaman dengan landasan ajaran agama kepada para santri bahwa ketersediaan energi yang terbatas, sehingga penggunaan energi berlebihan merupakan perilaku *israf*. Makanya, pemanfaatan energi alternatif atau baru terbarukan adalah bagian dari solusi yang maslahat;
- b. Selain secara mandiri, pihak pesantren dapat mengajukan kerja sama dengan pihak swasta atau pemerintah terkait pembangunan infrastruktur energi;
- c. Membentuk tim/manajemen yang nantinya bertugas mengawasi dan menjalankan program tata kelola energi baru terbarukan.

3.3 PROSEDUR

Untuk merealisasikan program Menuju Pesantren Hijau, ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan oleh pihak pesantren, yakni:

1. meneliti dengan cara mencari tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh pesantren, sehingga bisa diketahui apakah memiliki potensi di bidang tata kelola Air, Daur Ulang Sampah, Energi Baru Terbarukan, ataukah Ruang Terbuka Hijau;
2. memusyawarahkan bersama pengurus pesantren dan pengurus santri tentang potensi tata kelola mana yang



sebaiknya dikembangkan sebagai program Menuju Pesantren Hijau;

3. mengajukan kepada pihak LPBI agar selanjutnya dapat disurvei apakah potensi pesantren tersebut layak ataukah tidak untuk dibangun program tata kelola sesuai dengan potensinya;
4. jika dinilai layak berdasarkan lokasi, SDM, dan kesiapan pesantren, pihak LPBI kemudian akan membuat persiapan-persiapan bersama pihak-pihak terkait;

4. RUANG TERBUKA HIJAU (TAMAN PESANTREN)

Ruang terbuka hijau atau dalam konteks lembaga pendidikan sering disebut (*school garden*) atau taman pesantren adalah sebidang tanah yang dikelola dan didedikasikan untuk sebagai kebun atau taman yang didominasi oleh tumbuhan. Ruang terbuka hijau yang ditata dengan baik, manfaatnya dapat menjaga keseimbangan emosi peserta didik, guru dan seluruh keluarga besar sekolah atau pesantren.

Para ahli menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau dapat berfungsi sebagai pusat relaksasi untuk memberi efek semangat dan mengurangi risiko stres pada siswa dan guru. Dymont & Bell (2008) merekomendasikan agar setiap sekolah idealnya menyediakan kurang lebih 20 persen dari lahan pusat pendidikan untuk lahan terbuka hijau.

Dalam hal ini, pesantren berpotensi besar untuk mengaggas Ruang Terbuka Hijau mengingat pada umumnya pesantren memiliki bidang tanah yang cukup luas. Tidak jarang sebagian tanah yang belum didirikan bangun hanya dijadikan halaman terbuka, parkir kendaraan bahkan ada juga tanah yang dibiarkan begitu saja.



Untuk itu, hadirnya konsep Taman Pesantren dinilai banyak maslahatnya, yakni di antaranya:

- a. mengurangi polusi serta pencemaran udara;
- b. menghasilkan oksigen sehingga menambah kesegaran;
- c. menyerap radiasi matahari sehingga menurunkan suhu di sekitar;
- d. menambah estetika lingkungan pesantren;
- e. lokasi membaca atau menghafal bagi para santri.

4.1 INFRASTRUKTUR

Pada umumnya, di dalam ruang terbuka hijau atau taman berisi tumbuh-tumbuhan seperti bunga, rumput, pohon, air mancur, tempat duduk, saung/gazebo, dan lain-lain. Selanjutnya, yang perlu disiapkan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau atau Taman Pesantren di antaranya:

- a. sebidang tanah dengan luas 25-100 meter persegi yang berada di halaman atau sekitar kompleks pesantren;
- b. bunga-bunga berbagai jenis yang ditanam di tanah langsung maupun di pot;
- c. rerumputan yang biasanya berjenis rumput gajah atau rumput Jepang;
- d. tempat duduk atau saung/gazebo yang berfungsi sebagai tempat istirahat atau belajar;
- e. air mancur dan kolam ikan;
- f. papan tulisan yang berisi dalil, *maqalah*, ajakan untuk menjaga dan merawat kebersihan, kelesatarian dan keasrian lingkungan taman.



4.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Selain kesiapan finansial dan material untuk pembangunan infrastruktur ruang terbuka hijau atau taman pesantren, kesiapan sumber daya manusia juga penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya, tim pengelola taman pesantren harus dibekali pengetahuan dan keterampilan khusus. Adapun struktur tim pengelola tersebut dapat terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas, dapat terdiri dari ustad/kiai dan lurah pondok yang bertugas mengawasi Tim Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau atau Taman Pesantren;
- b. Direktur Tim Program, diangkat dari unsur ustad/santri yang bertugas untuk mengatur dan menjalankan pengelolaan Taman Pesantren bersama para staf/anggotanya;
- c. Bagian Perawatan, bertugas mengatur tata letak dan memelihara tanaman-tanaman yang ada di taman;
- d. Bagian Kebersihan, bertugas mengawasi dan membersihkan taman dari sampah.

4.3 KEBIJAKAN PESANTREN

Pengurus/pengasuh pesantren berperan penting dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau atau taman yang berada di lingkungannya. Maka dari itu, pihaknya perlu menetapkan beberapa kebijakan, di antaranya:

- a. mengizinkan sebidang lahan kosong di kompleks pesantren untuk dijadikan taman;
- b. memberikan pemahaman kepada para santri agar ikut serta dalam menjaga dan merawat ruang terbuka hijau pesantren;



- c. memberi sanksi tegas kepada siapa yang mengotori atau merusak ruang terbuka hijau pesantren;
- d. menjadikan ruang terbuka hijau atau taman pesantren sebagai salah titik tempat belajar santri di luar jadwal pembelajaran.

4.4 PROSEDUR

Untuk merealisasikan program Menuju Pesantren Hijau, ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan oleh pihak pesantren, yakni:

1. meneliti dengan cara mencari tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh pesantren, sehingga bisa diketahui apakah memiliki potensi di bidang tata kelola Air, Daur Ulang Sampah, Energi Baru Terbarukan, atautkah Ruang Terbuka Hijau;
2. memusyawarahkan bersama pengurus pesantren dan pengurus santri tentang potensi tata kelola mana yang sebaiknya dikembangkan sebagai program Menuju Pesantren Hijau;
3. mengajukan kepada pihak LPBI agar selanjutnya dapat disurvei apakah potensi pesantren tersebut layak atautkah tidak untuk dibangun program tata kelola sesuai dengan potensinya;
4. jika dinilai layak berdasarkan lokasi, SDM, dan kesiapan pesantren, pihak LPBI kemudian akan membuat persiapan-persiapan bersama pihak-pihak terkait;



Praktik Terbaik Pesantren Hijau

Gagasan tentang Pesantren Hijau memang masih relatif baru, namun sebenarnya secara praktik banyak kalangan pesantren yang secara alamiah sudah ‘mengamalkan’ gagasan tersebut. Terbukti tidak sedikit pesantren yang sudah memberdayakan para santrinya untuk mengelola perkebunan, persawahan, hingga melakukan konservasi alam di sekitar area pesantren. Hanya saja, perlu beberapa sentuhan agar peran yang sudah dijalankan tersebut dapat diselaraskan dengan isu-isu lingkungan yang ada dalam konsep “Pesantren Hijau”.

Di bawah ini ada beberapa profil pesantren yang bisa dibilang layak menjadi percontohan Pesantren Hijau bagi lembaga pesantren lainnya.

(1)

PESANTREN IHYA’ ULUMADDIN CILACAP BANK SAMPAH NUSANTARA BERNILAI EKONOMIS

Pondok Pesantren Al-Ihya ‘Ulumaddin berlokasi di Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, di atas areal tanah seluas 4 Ha. Kehadiran Pondok Pesantren ini dilandasi dengan semangat keagamaan untuk berdakwah yang bertujuan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditindas oleh penjajah Belanda pada saat itu.

Pada 24 November 1925/1344 H, seorang tokoh ulama KH Badawi Hanafi mendirikan Pondok Pesantren di Desa Kesugihan, beliau memanfaatkan mushala peninggalan ayahnya KH Fadil untuk mengawali perintisan pesantren, mushala atau langgar tersebut dikenal dengan nama “Langgar Duwur”. Disebut Langgar Duwur karena mushala (langgar dalam bahasa Jawa) tersebut



menggunakan konstruksi panggung.

Pada awalnya pondok pesantren ini dikenal dengan nama Pondok Pesantren Kesugihan. Namun pada 1961 pesantren ini berubah nama menjadi Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam (PPAI), kemudian pada tahun 1983 kembali berubah nama menjadi Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin. Perubahan nama dilakukan oleh KH. Mustolih Badawi, Putra KH. Badawi Hanafi. Perubahan itu dilakukan untuk mengenang Almarhum ayahnya yang sangat mengagumi karya monumental Imam Al-Ghozali (Kitab Ihya 'Ulumiddin) tentang pembaharuan Islam.

Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin Kesugihan, secara ekonomi berada pada masyarakat plural (beragam) yang terdiri dari nelayan, pedagang, petani, wiraswasta, dan pegawai negeri. Dari segi geografis, lokasi pesantren dekat dengan pusat kota Cilacap. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi proses perkembangan pesantren dalam upaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur tradisi keagamaan.

Mendirikan Bank Sampah Nusantara

Sebagai upaya menuju Pesantren Hijau, atas dorongan dan bantuan beberapa pihak, Ihya Ulumaddin mendirikan Bank Sampah Nusantara (BSN) Al-Ihya sebagai wadah pemberdayaan santri dalam isu-isu lingkungan. Sebagai salah satu program ekstrakurikuler, BSN Al-Ihya mempunyai jargon “Mengelola sampah itu ibadah”.

Dirintis pada bulan Maret 2018, para anggota BSN Al-Ihya mendaur ulang limbah yang dihasilkan dari sekitar 1000 santri yang bermukim di sana. Limbah sampah yang dimanfaatkan



di antaranya limbah plastik (kantong, botol, perabot), kaca, kertas, kain bekas.

Adapun hasil dari daur ulang limbah-limbah tersebut, seperti limbah kain bekas menjadi pot bunga dan lampu tidur, lalu limbah koran menjadi jam dinding, hiasan meja, limbah plastik menjadi paving blok. Sedangkan limbah sampah organik menghasilkan produk pupuk organik cair PGPR yang berguna untuk merangsang tumbuhan pada palawija dan padi.

Ke depannya, BSN Al-Ihya akan terus mengembangkan inovasi daur ulang sampahnya agar dapat memproduksi secara massal sehingga menjadi salah satu badan usaha yang menunjang kas pesantren.

(2)

PESANTREN ANNUQAYYAH SUMENEP PENGGERAK PENYELAMAT LINGKUNGAN

Mendapatkan penghargaan Kalpataru bukanlah suatu prestasi biasa-biasa saja. Penghargaan mulia itu hanya dipersembahkan kepada orang atau lembaga yang benar-benar memiliki kesadaran dan dedikasi tinggi terhadap kelestarian lingkungan alam. Makanya, penghargaan Kalpataru yang didapat oleh Pesantren Annuqayyah pada 1981 merupakan suatu pencapaian spesial sebagai lembaga pendidikan kaum santri yang selama ini dinilai publik hanya konsen pada isu-isu keagamaan.

Sebagaimana jamak diketahui, Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan



lingkungan hidup di Indonesia. Kalpataru memiliki 4 kategori penghargaan, yaitu, 1) Perintis Lingkungan, 2) Pengabdian Lingkungan, 3) Penyelamat Lingkungan, 4) Pembina Lingkungan.

Dari empat kategori itu, Pesantren Annuqayyah Guluk-Guluk Sumenep disematkan sebagai “Penyelamat Lingkungan”, karena sebagai lembaga yang berhasil melakukan upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pencegahan kerusakan dan pencemaran (penyelamatan) lingkungan hidup. Keterlibatan Annuqayyah dalam melebarkan sayap menjadi ‘pesantren hijau’ inilah kemudian menginspirasi pesantren lainnya untuk bersentuhan dengan isu-isu lingkungan.

Inisiatif Pesantren Hijau

Kegiatan penghijauan pesantren Annuqayyah mulai dicanangkan sejak tahun 1978. Berawal dari pemasyarakatan pemanfaatan pekarangan, lalu dilanjutkan dengan pembibitan beberapa jenis pohon seperti lamtorogung, akasia, turi dan kapu, dengan mengerahkan para santri menanam bibit-bibit pohon itu terutama di sepanjang jalan di sekitar pesantren. Lantaran dinilai ada hasilnya upaya ini kemudian dikembangkan melalui kelompok-kelompok pengajian remaja yang beranggotakan 236 orang, ditambah kelompok-kelompok pengajian umum yang ada di masyarakat.

Selain itu, pada setiap awal musim hujan diadakan kegiatan penghijauan antrarpesantren. Hanya dalam waktu tiga tahun keadaan pegunungan yang tandus, terutama di sekitar pesantren berubah menjadi hijau. Tidak berhenti di situ, kegiatan penghijauan terus dilanjutkan. Di sela-sela



kesibukan di madrasah/sekolah, para santri yang bergabung dalam kegiatan BPM membuat pembibitan di dalam kompleks pesantren.

Dalam waktu dua tahun santri bersama anggota kelompok tahlilan telah menanam 500 pohon turi, 500 pohon kapuk, 1500 pohon lamtorogung, dan 200 pohon akasia, tersebar di desa Guluk-Guluk. Dengan usaha itu, pada hari lingkungan hidup tahun 1981, Annuqayyah memperoleh penghargaan Kalpataru dari Presiden RI. Beberapa tahun berikutnya penghargaan yang sama juga diperoleh pesantren Nurul Huda, Pekandangan, Sumenep, salah satu pesantren binaan Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren Annuqayyah (BPM-PPA) dalam bidang pengembangan masyarakat.

Kunci dan Tantangan Annuqayyah

Menguatkan pendidikan lingkungan pendidikan seperti pesantren dan sekolah adalah salah satu kunci utama membangun kesadaran insan pelajar peka terhadap isu-isu lingkungan. Hal ini juga berarti membawa kurikulum ke arah yang lebih kontekstual, membumi, dan mengakar dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat tempat murid itu berasal, sebagaimana yang dilakukan santri-santri Annuqayyah.

Dukungan dan teladan yang diberikan oleh para guru dan kiai juga mendorong anak didiknya untuk semangat dan percaya diri bahwa kepedulian terhadap kelestarian lingkungan merupakan ajaran yang benar-benar ditekankan oleh syariat Islam. Dari situ, santri-santri Annuqayyah kini meneruskan prestasi di bidang lingkungan dengan melakukan tindak lanjut aksi ini lebih solid dalam bentuk komunitas yang oleh murid-murid dinamakan Pemulung Sampah Gaul (PSG).



Selain aktif memunguti sampah, para anggota PSG juga berhasil melakukan gebrakan berbagai daur ulang sampah pesantren dan sekolah menjadi kerajinan yang punya nilai ekonomis. Dana yang di dapat kemudian dibelikan mesin jahit dan kegiatan lainnya. Bahkan, lantaran gerakannya sangat inspiratif, PSG beberapa kali diundang ke sekolah-sekolah lain untuk mengkampanyekan pentingnya merawat lingkungan.

(3) PESANTREN AL-YASINI PASURUAN INSTALASI BIOGAS KOMUNAL

Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini yang berlokasi di Desa Areng-areng, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdiri tahun 1940. Pada mulanya kegiatan pesantren berbentuk pengajian *kalongan* bertempat di mushala diikuti santri yang mukim maupun masyarakat santri di sekitar pesantren. Sampai saat ini, jumlah santri yang menginap di pesantren ini sekitar 3.000 orang terdiri dari 1.200 santri putra dan 1.800 santri putri.

Saat ini Al-Yasini mempunyai instalasi biogas komunal untuk mengolah kotoran manusia menjadi biogas. Program pemanfaatan energi tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada 7 April 2018. Selain di Al-Yasini, sejak 2015, Kementerian ESDM setidaknya sudah memberdayakan 17 pesantren lainnya di seluruh Indonesia untuk menggunakan biogas sebagai sumber energi.

Pengembangan instalasi biogas adalah bagian dari pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai upaya



mewujudkan ketahanan energi nasional. Pengelolaan biogas dari limbah dapat menciptakan energi yang terjangkau dan energi yang ramah lingkungan, dimulai dari skala kecil, sebagaimana di lingkungan pesantren.

Pembangunan instalasi biogas komunal Pesantren Al Yasini saat ini meliputi 50 unit WC, digester biogas dengan kapasitas 2x12 meter kubik tipe *fixed dome* beton, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kapasitas 180 meter kubik. Energi tersebut mampu menghasilkan gas sebanyak 81 meter kubik per bulan atau setara dengan 12 tabung LPG 3 kg per bulan. Selain untuk memasak, biogas ini juga dapat digunakan untuk lampu penerangan pesantren.

Untuk tahap awal, pemanfaatan biogas komunal Al-Yasini dapat mengurangi pemakaian LPG 3 kg per bulan sebanyak 3 tabung, hingga 12 tabung pada kondisi optimal. Sehingga dapat menghemat pengeluaran bulanan mulai dari Rp75.000 hingga Rp 300.000.

Pesantren Al-Yasini dapat menjadi contoh bahwa lembaga pendidikan seperti pesantren memang sangat berpotensi untuk mengembangkan energi baru terbarukan yang hemat dan ramah lingkungan.

(4)

PESANTREN DARUL MUTTAQIN BOGOR PERHATIAN LAHAN HIJAU DAN DAUL ULANG SAMPAH

Pondok Pesantren Darul Muttaqien terletak di wilayah Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesantren ini berdiri pada tahun 1988 M, tepatnya tanggal 18 Juli 1988. Berdirinya Darul Muttaqien berawal dari



pemberian tanah wakaf seluas 1,8 hektar oleh pemiliknya H. Mohamad Nahar, seorang mantan wartawan senior media nasional kepada KH. Sholeh Iskandar (alm) ketua BKSPPI (Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia) pada tahun 1987. Dalam perkembangannya sampai sekarang, luas lahan Pesantren Darul Muttaqien sudah mencapai sekitar 16 hektar.

Sebagai pesantren di daerah penopang Ibu Kota, Darul Muttaqien mempunyai keunggulan tersendiri dibanding pesantren lainnya. Melalui aset lahan yang sangat luas, pesantren ini pada 2007 pernah mendapatkan penghargaan sebagai “ekopesantren” dari Pemerintah. Penghargaan ini adalah sebuah istilah yang disematkan kepada pesantren-pesantren yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup dan konservasi alam. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program lingkungan yang meliputi kriteria-kriteria tertentu.

Salah satu prinsip penting Darul Muttaqien yakni menekankan lahan yang dibangun itu 40%, yang ruang bebasnya itu ruang hijaunya itu 60%. Bangunan itu hanya 40% dari sekitar 1,5 hektar itu yg dibangun hanya maksimal 40%, Itu akan menjadi nyaman.

Kaitannya bidang lingkungan, Darul Mutaqqien selama ini mempunyai prinsip, “Harus selalu menanam dan jangan selalu berharap untuk memanen”. Jadi, selama mereka mampu, apapun bisa ditanam untuk kemaslahatan santri dan masyarakat sekitar pesantren.

Kebersihan dan keasrian lingkungan menjadi prioritas utama Darul Muttaqien. Hal ini berdasarkan niat awal sang pendiri bahwa pesantren bukan pesantren yang kumuh, tetapi



menjadi model pesantren yang bersih. Bersih itu bukan hanya batin, fisik, jiwa tapi lingkungan juga harus diperhatikan. Tidak heran apabila pesantren ini pernah mendapat gelar pesantren terbersih se-Jawa Barat itu dari Gubernur tahun 2001-2002. Bahkan, baru-baru ini menjadi model “Pesantren Ramah Anak” dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Berkah Penanaman dan Penghijaun

Selama ini pesantren Darul Muttaqien fokus menanam tanaman-tanaman yang ada nilai ekonomisnya. Selain itu juga m menggarap pembibitan tanaman, dari pembibitan nanti akan dijual dan dijual kembali. Mereka juga melestarikan pohon-pohon jati di atas bidang tanah 2-23 hektar yang kita lestarikan di lahan yang jaraknya jauh dan bibit jato dekat dari area asrama pesantren. Bukan hanya pohon jati, saja ada juga pohon pule yang mana kayunya yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan wayang golek.

Saking banyaknya persediaan kayu, Darul Muttaqien tidak pernah kekurangan papan kayu untuk proses pembangunan gedung. Bahkan, ranting-ranting dari pohon kayu jati untuk dimanfaatkan bahan bakar tungku untuk memasak nasi dan makanan lain, sehingga tidak perlu lagi membeli gas elpiji, dan cukup hanya membiayai bumbu-bumbu dapur untuk masak.

Manfaat lain dari penghijauan yang dikelola Darul Muttaqien adalah sisi sanitasi air. Sampai saat ini Darul Muttaqin tidak pernah kekurangan air karena pepohonan yang masih banyak dan mengandung mempertahankan daya air-air supaya tidak hilang. Ada pengeboran tanah di 3 titik yang mampu memberikan fasilitas untuk kurang lebih 3000 santri tingkat Ibtidaiyyah sampai Aliyah.



Pengembangan Daur Ulang Sampah

Tidak hanya menekuni di bidang penghijauan, Darul Muttaqien juga perhatian terhadap persoalan sampah dengan melakukan program daur ulang sampah yang volume setiap harinya kurang lebih mencapai 4-5 kwintal. Hanya saja program ini baru sebatas pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik, seperti pemilahan botol-botol plastik. Itu pun biasanya dijual dan menghasilkan uang 4-5 juta perbulan. Melalui penjualan botol plastik, pengurus pesantren mampu untuk mengangsur mobil yang dipakai untuk mengangkut sampah-sampah di area pesantren.

Dalam proses daur ulang, sampah-sampah sudah yang diangkut di pusat pembuangan sampah itu tidak boleh ada sampah yang tersisa, sehingga sampah anorganik sampai saat ini kita baru mampu melalui pembakaran. Sedangkan pembakaran sampah organik juga tidak ada sampah yang tersisa sebab abu-abunya dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk pupuk.

Rencana ke depan, Darul Muttaqien akan mengembangkan daur ulang sampah sebagai produk kerajinan dan pemanfaatan lainnya agar volume sampah yang mencemari lingkungan dapat semakin berkurang. Selain itu, pengembangan lahan sebagai lahan hijau akan terus ditambah agar lingkungan pesantren Darul Muttaqien semakin membawa dampak yang baik bagi kelestarian alam.



DAFTAR PUSTAKA

- Blue, G. t. (2019). "World Environment Day: 5 June 2019 | Greening the Blue." Retrieved 13 May, 2019, from <https://www.greeningtheblue.org/event/world-environment-day>.
- Forest and media campaign, I. (2004). Fiqih Lingkungan (fiqh al-bi'ah). K. H. D. A. S. Muhammad, K. D. H. Mumammad, K. R. Mabur et al. Jakarta, Conservation International Indonesia.
- Mangunjaya, F. M. (2013). "Islam and Natural Resource Management." Integrating Religion Within Conservation: Islamic Beliefs and Sumatran Forest Management: 11.
- Sauvé, L. (1996). "Environmental education and sustainable development: A further appraisal." Canadian Journal of Environmental Education **1**: 7-34.
- Zuhud, E. A. (2009). "Potensi hutan tropika Indonesia sebagai penyangga bahan obat alam untuk kesehatan bangsa." Jurnal Bahan Alam Indonesia **6(6)**: 227-232.

